

JURNAL BPPK
Volume 1, Nomor 2, Agustus 2010

Faktor-Faktor Risiko Fiskal dalam Penganggaran Daerah

Oleh :

Arina Romarina

Akhmad Makhfatih

Faktor-Faktor Risiko Fiskal dalam Penganggaran Daerah

Arina Romarina¹

Akhmad Makhfatih²

Abstract

Fiscal risk refers to the chance that some unfavorable event will occur in fiscal term. It also influences the implementation of Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) and Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) The impact of fiscal risk is on the accuracy of government financial target or imbalanced financial budgeting.

The aim of this research is to identify and analyze the fiscal risk factors in local financial budgeting. Quantitative and qualitative methods are used in this research where confirmatory factor analysis is used as analitical tools. The primary data is collected from 125 respondents who are civil servant. The qualification of the respondent is the civil servant who has been ever involve in arranging local budget.

The results show that there are many fiscal risk factors in local budgeting. These factors involve both external and internal aspects such as synchronization of APBD with Kebijakan Umum Anggaran (KUA) and Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), risk management, accessibilty and transparancy, target and performance indicators, legislative and executive relations, opportunistic behaviour, moral hazard, organization management, risk anticipation, the pattern of financial planning, the financial planning lag approval, the unwritten expenses and macroeconomics conditions.

Keywords: *fiscal risk, financial budgeting, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), confirmatory factors analysis*

¹ Pegawai pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru

² Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada

Pendahuluan

Salah satu *issue* yang sangat penting dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah pengelolaan keuangan daerah. Hal ini disebabkan karena fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai alat fiskal utama di daerah mempunyai peranan yang cukup kuat dalam menunjang pertumbuhan ekonomi di daerah yang pada akhirnya bermuara kepada pertumbuhan ekonomi nasional. Namun dalam proses penganggaran APBD tersebut tentu menghadapi berbagai ketidakpastian yang akan mempengaruhi keakuratan dalam pencapaian target-target anggaran. Ma (2002:393) mengatakan bahwa dikebanyakan negara, pemerintah daerah (pemda) memiliki fungsi dan kewajiban serta bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada publik. Untuk itu kesehatan keuangan pemda merupakan bagian yang sangat penting dari keseluruhan sistem keuangan negara. Masalahnya, pemerintah daerah seringkali memiliki informasi yang terbatas mengenai kesehatan keuangannya termasuk bagaimana mengukur kegiatan fiskal dan kemungkinan risiko yang dihadapi dengan cara yang tepat dan reliabel. Hal ini bisa menyebabkan adanya kerentanan fiskal (*fiscal vulnerability*). Kerentanan fiskal merupakan suatu kondisi ketika pemerintah mengalami kegagalan dalam mengkoordinasikan tujuan kebijakan fiskal secara keseluruhan (Hemming, 2000:164). Terjadinya risiko fiskal yang

tidak diantisipasi dengan baik akan membebani anggaran dan mempengaruhi target pertumbuhan ekonomi.

Pengungkapan risiko dalam Nota Keuangan (2008) sangat diperlukan untuk memberikan gambaran yang utuh tentang posisi fiskal Pemerintah. Transparansi sebagai salah satu komponen penting dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah menuntut adanya pengungkapan informasi dan semua hal yang dianggap penting untuk diketahui publik khususnya risiko fiskal dalam proses perencanaan keuangan dan penganggaran pemerintah. Pemahaman terhadap risiko menjadi keniscayaan untuk dapat menentukan prioritas strategi dan program dalam pencapaian tujuan organisasi. Pengungkapan risiko fiskal yang merupakan prasyarat penting untuk menjaga terpeliharanya kesinambungan pendapatan negara, belanja negara dan pembiayaan anggaran dipandang perlu untuk memenuhi tuntutan transparansi tersebut. Oleh karena itu perlu dilakukan suatu kajian untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menjadi risiko fiskal dalam penganggaran daerah (APBD).

Studi Literatur

Menurut Hanafi (2006:58), risiko merupakan suatu kondisi ketidakpastian atau peristiwa-peristiwa yang tidak bisa diramalkan secara pasti akan terjadi di masa mendatang. Sementara Jorion (2001:3) mengatakan bahwa risiko merupakan volatilitas atau guncangan yang terjadi dan tidak

diharapkan pada suatu tujuan tertentu. Dari berbagai definisi di atas, risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk (kerugian) yang tidak diinginkan, atau tidak terduga. *International Monetary Fund* (IMF, 2007:1) menyatakan definisi risiko fiskal sebagai “*short to medium term variations in the level of government expenditure, revenue, assets, and liabilities that are not anticipated in the budget estimates*”. Definisi risiko fiskal menurut Bixi and Shick (2002:2) adalah “*fiscal risk as a source of financial stress that could face a government in the future*” (risiko fiskal merupakan sumber dari tekanan finansial yang akan dihadapi oleh pemerintah di masa yang akan datang). Risiko fiskal diasosiasikan sebagai kewajiban kontingensi pemerintah (*government contingent liabilities*). Sementara itu *The Budgeting Responsibility Law* (BRL) yang diterapkan di Brazil mendefinisikan dua risiko penganggaran (*budgetary risks*), yakni (1) penentuan pendapatan yang terlalu tinggi (***overestimation of revenues***) dan (2) penentuan belanja terlalu rendah (***underestimation of expenditure***). Menurut Schick (2008), risiko fiskal cenderung diestimasi terlalu rendah (*underestimated*) ketika anggaran disusun, sehingga biaya yang sebenarnya hanya bisa diketahui belakangan ketika sudah terlambat untuk mengatasinya. Jadi dapat dikatakan bahwa risiko fiskal adalah suatu kondisi ketidakpastian peristiwa-peristiwa (*events*) yang mungkin terjadi di masa datang serta dapat berpengaruh pada posisi dan

pelaksanaan fiskal pemerintah, yang dinyatakan dalam dokumen APBN dan APBD dengan komponen-komponen berupa pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Dalam hal ini, risiko diartikan sebagai hal-hal yang mempengaruhi keakuratan pemerintah dalam menentukan target-target anggaran.

Blondal (2008:1) menyatakan ada lima kategori sumber risiko fiskal, yakni asumsi ekonomi, struktur utang pemerintah, penjaminan oleh pemerintah, kerjasama pemerintah dan swasta, dan bencana alam. Sumber lain dari risiko fiskal adalah berbagai peraturan dan ketentuan dalam penganggaran serta sistem pelaporan keuangan yang dapat mempengaruhi alokasi sumber daya, pemilihan waktu dan pengesahan transaksi, serta bisa memberikan berbagai kesempatan dan dorongan untuk merubah biaya dan risiko dari satu periode ke periode berikutnya dan dari pemerintah satu ke pemerintah lainnya (Polackova dan Mody, 2002:32). Schick (2002:79) menyatakan bahwa sistem akuntansi tradisional yang digunakan oleh banyak negara selain memiliki berbagai kelebihan tapi secara *inherent* memiliki kekurangan dalam mengukur kegiatan fiskal. Hal ini dapat dilihat pada kemampuan anggaran konvensional yang tidak mampu mengukur risiko fiskal dalam anggaran yakni tidak mampu mengantisipasi beban pada anggaran di masa depan akibat adanya *contingent liabilities*.

Organisasi pemerintah daerah dapat dipandang sebagai kumpulan orang, yang masing-masing memiliki motivasi dan kepentingan yang berbeda-beda. Banyaknya berbagai kepentingan dalam anggaran menyebabkan proses penganggaran akan sangat rentan terhadap berbagai bentuk penyimpangan baik dalam bentuk perilaku oportunistik maupun *moral hazard* dari pihak-pihak yang terkait didalamnya. Polackova dan Shick (2002:2) mengatakan “*often fiscal risk, particularly those in the form of contingent liabilities, arise from politic and fiscal opportunism.*” Lebih lanjut dikatakan bahwa “*the largest scope for fiscal ooportunism is traditionaly offered by the financial sector. Government are accustomed to using financial institution, private or stated-owned, to finance various project and support program.*” (Polackova dan Shick (2002:9). Adanya asimetri informasi diantara eksekutif-legislatif dan legislatif-pemilih menyebabkan terbukanya ruang bagi terjadinya perilaku oportunistik dalam proses penyusunan anggaran. Halim dan Abdullah (2008:1) mengatakan Eksekutif merupakan agen bagi legislatif dan publik (*dual accountability*) dan legislatif agen bagi publik. Konsep perwakilan (*representativeness*) dalam penganggaran tidak sepenuhnya berjalan ketika kepentingan publik tidak terlindungi seluruhnya oleh karena adanya perilaku oportunistik (*moral hazard*) legislatif. Di sisi lain, eksekutif sebagai agen cenderung menjadi budget maximizer karena berperilaku oportunistik (*adverse selecation* dan

moral hazard sekaligus). Abdullah dan Asmara (2006: 20) juga menyebutkan bahwa distorsi perencanaan dan penganggaran dapat terjadi karena perilaku oportunistik legislatif ditunjang dengan adanya kewenangan untuk merubah alokasi anggaran yang telah dirancang dalam proses perencanaan oleh eksekutif dan pihak legislatif melakukan *political corruption* melalui realisasi *discretionary power* yang dimilikinya.

I. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan serta mencapai tujuan penelitian maka metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Menurut Boyd (1989) yang dikutip dalam Kuncoro (2003:8) penelitian deskriptif berupaya untuk memperoleh deskripsi yang lengkap dan akurat dari suatu situasi. Data yang digunakan diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) yaitu melalui penyebaran kuesioner dengan menggunakan skala likert yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial tertentu, yang telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian (Sugiyono, 2008:132).

Proses pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Soeratno dan Arsyad (2003:119) berpendapat bahwa sampel yang *purposive* adalah sampel yang dipilih dengan cermat sehingga relevan

dengan rancangan penelitian. *Purposive sampling* dilakukan dengan mengambil orang-orang yang dipilih oleh peneliti menurut ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh sampel itu.

Objek dalam penelitian ini adalah para mahasiswa tugas belajar di Magister Ekonomika Pembangunan (MEP), Magister Akuntansi (MAKSI) yang berstatus Pegawai Negeri Sipil Daerah, peserta Kursus Keuangan Daerah (KKD) angkatan XXIII, Latihan Keuangan Daerah (LKD) angkatan V dan Kursus Akuntansi Keuangan Daerah (KAKD) angkatan V di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Kriteria sampel yang dianalisis adalah responden yang pernah terlibat dalam perencanaan dan penyusunan anggaran daerah baik sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) maupun non Tim Anggaran Pemerintah Daerah (non TPAD).

a. Analisis faktor

Tujuan utama dari analisis faktor adalah mendefinisikan struktur suatu data matrik dan menganalisis struktur saling hubungan (korelasi) antarsejumlah besar variabel dengan cara mendefinisikan satu set kesamaan variabel atau dimensi dan sering disebut dengan faktor (Ghozali, 2007:267). Dengan analisis faktor, identifikasi dimensi suatu struktur, kemudian ditentukan sampai seberapa jauh setiap variabel dapat dijelaskan oleh setiap dimensi,

sehingga ditemukan suatu cara meringkas (*summarize*) informasi yang ada dalam variabel asli (awal) menjadi satu set dimensi baru atau *variate factor* dengan cara menentukan struktur melalui data *summarization* atau melalui data *reduction*. Dalam analisis faktor dikenal ada dua pendekatan utama yaitu: *exploratory factor analysis* dan *confirmatory factor analysis*. *Exploratory factor analysis* digunakan bila banyaknya faktor yang akan dibentuk tidak ditentukan lebih dahulu, sedangkan *confirmatory factor analysis* digunakan apabila faktor yang terbentuk telah ditetapkan terlebih dahulu. Penelitian ini menggunakan analisis faktor konfirmatori.

b. Variabel penelitian

Fokus penelitian ini adalah mengeksplorasi faktor-faktor risiko fiskal dalam penganggaran daerah. Karakteristik penelitian ini mencakup hal-hal yang menyangkut berbagai hal yang mengakibatkan terjadinya ketidakakuratan (risiko) dalam pencapaian target realisasi anggaran menurut persepsi para responden yang pernah terlibat langsung dalam penyusunan APBD. Variabel tersebut kemudian dituangkan dalam 54 item variabel dalam kuesioner yaitu:

1. regulasi dan mekanisme penyusunan anggaran, yaitu ketersediaan pedoman dan petunjuk pelaksanaan, teknis

- penganggaran, baik berupa Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), peraturan serta perundangan-undangan keuangan daerah.
2. informasi dan komunikasi, yaitu pemahaman tujuan dan fungsi serta prosedur penganggaran, peranserta atau partisipasi, koordinasi dan kerjasama dalam perencanaan dan perumusan anggaran, ketersediaan informasi pendukung serta akses ke dokumen hasil dan pelaporan penyimpangan, dan adanya ruang publik untuk informasi dan komunikasi.
 3. politik dalam penganggaran, yaitu kondisi ketika penentuan kebijakan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), sangat dipengaruhi oleh intervensi lembaga perwakilan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan hubungan pihak eksekutif dan legislatif dalam perumusan, pengesahan, pelaksanaan dan pengawasan anggaran. Faktor politik dalam penganggaran daerah sangat dominan karena melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penentuan alokasi akhir di Anggaran Penadapatan dan Belanja Daerah (APBD).
 4. perilaku oportunistik dan *moral hazard*, yaitu tentang perilaku dalam pembuatan keputusan alokasi belanja dan preferensi yang mengarah pada alokasi belanja yang dapat memberikan *rente* para penyusun anggaran, termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah daerah (RKA-SKPD) memiliki kepentingan berbeda.
 - a. perilaku oportunisme anggaran (*fiscal opportunism*), yaitu tentang perilaku oportunistik dalam pembuatan keputusan alokasi belanja dan Preferensi yang mengarah pada alokasi belanja yang dapat memberikan *rente* juga keinginan untuk “aman” secara fiskal, yakni anggaran bisa terealisasi tepat waktu dan tepat jumlah, memiliki peluang untuk “menambah” alokasi saat perubahan APBD, dan kemungkinan variansi (selisih anggaran dan realisasi sampai akhir tahun) yang rendah.
 - b. *moral hazard*, menunjukkan bagaimana penyusun anggaran/RKA-SKPD “menyembunyikan” atau “memanfaatkan” keunggulan informasi (*informational advantage*) yang dimilikinya

untuk keuntungan pribadinya (selaku *agent* dalam hubungan keagenan/*agency relationship*).

5. ekspektasi risiko oleh pengusul dan penyusun anggaran, yaitu meliputi pemahaman aparatur daerah penyusun dan pengusul kebijakan dan anggaran tentang informasi tujuan dan fungsi serta prosedur penyusunan keuangan yang harus diketahui dan dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan anggaran serta pemahaman tentang risiko dan bagaimana cara mengantisipasinya dalam

anggaran Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Hasil Analisis Data dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penyeleksian kuesioner terhadap 391 kuesioner, yang hanya 129 kuesioner yang layak dianalisis sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Melalui seleksi tingkat pemahaman mengenai penganggaran daerah maka hanya 125 kuesioner yang selanjutnya dianalisis.

Berikut disajikan data responden yang dianalisis.

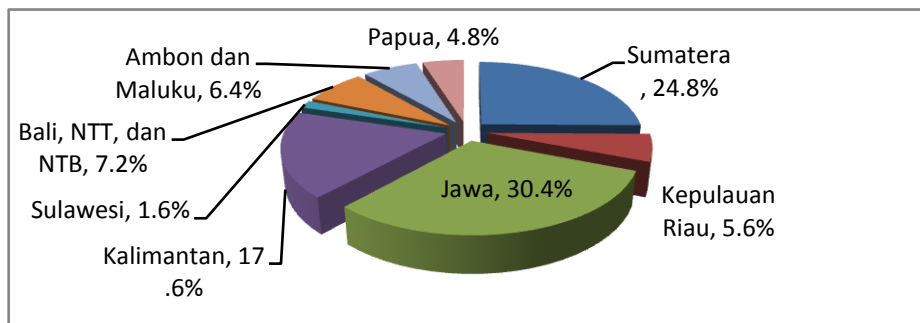
Tabel 1
Data Responden yang Dianalisis

No	Responden	Penyusun APBD		Jumlah
		TAPD	Non TAPD	
1	Mahasiswa Magister Ekonomika Pembangunan (MEP), Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD)	27	48	75
2	Mahasiswa Magister Akuntansi (MAKSI), Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD)	0	3	3
3	Peserta Kursus Keuangan Daerah (KKD)	4	14	18
4	Peserta Latihan Keuangan Daerah (LKD)	2	11	13
5	Peserta Kursus Akuntansi Keuangan Daerah (KAKD)	2	14	16
Total		35	90	125

Data Primer: (diolah)

Sebaran responden berdasarkan daerah dideskripsikan pada gambar 1. Pada gambar 1 terlihat bahwa asal responden sebagian besar berasal dari pulau Jawa 30,4 persen, Sumatera 24,8 persen, Kalimantan 17,6 persen, Bali,

NTT dan NTB sebesar 7,2 persen, Maluku 6,4 persen, Kepulauan Riau 5,6 persen serta jumlah responden yang sedikit bersasal dari Papua sebesar 4,8 persen dan Sulawesi 1,6 persen.



Gambar 1
Data Responden berdasarkan Daerah

Analisis faktor yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis faktor konfirmatori (*Confirmatory Factor Analysis*). Hair (1998) menyatakan bahwa alat analisis ini berguna untuk menguji dan mengidentifikasi struktur faktor-faktor suatu objek penelitian. Dengan analisis faktor konfirmatori dilakukan pengujian apakah indikator dalam setiap konstruk yang telah ditetapkan sebelumnya benar merupakan indikator konstruk tersebut. Analisis konfirmatori akan mengelompokkan masing-masing indikator ke dalam beberapa faktor. (Ghozali, 2006:51-54)

1. Uji korelasi antar item variabel

Nilai *Kaiser-Meyer-Olkin* (KMO) yang dikehendaki harus $> 0,50$ dan uji *Bartlett* yang memiliki nilai *chi-square* yang signifikan merupakan syarat untuk bisa dilakukannya analisis faktor (Ghozali, 2006:53). Apabila nilai

uji *Kaiser-Meyer-Olkin* (KMO) dan *Bartlett test* pada setiap faktor risiko lebih besar dari 0,5 dengan tingkat signifikan 0,000, maka dapat disimpulkan bahwa antar variabel terdapat korelasi sehingga *item* pernyataan yang ada dapat dianalisis lebih lanjut. Nilai *Kaiser-Meyer-Olkin* (KMO) dan *Bartlett's test* dijabarkan pada tabel 2. Uji *confirmatory factor analysis* untuk keseluruhan variabel menunjukkan bahwa validitas konstruk dianggap valid atau memenuhi syarat. Hasil Uji *Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy* (KMO-MSA) terhadap seluruh variabel pada tabel 4 menunjukkan nilai $> 0,5$, yaitu 0,862 pada faktor 1, nilai 0,631 pada faktor 2, nilai 0,805 pada faktor 3, nilai 0,751 pada faktor 4 dan 0,691 pada faktor 5, yang berarti ukuran kesesuaian sampel dan *goodness of fit* yang digunakan untuk meneliti ketetapan analisis faktor sudah terpenuhi.

Tabel. 2
Uji Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy dan Bartlett's

Faktor/Konstruksi	KMO-MSA	Bartlett's Test of Sphericity		
		Approx. Chi-Square	df	Sig.
Regulasi dan Mekanisme	0,862	483,282	45	0,000
Informasi dan Komunikasi	0,631	278,421	55	0,000
Politik	0,805	318,625	36	0,000
Perilaku Opportunistik dan <i>Moral Hazard</i>	0,751	388,223	66	0,000
Ekspektasi Risiko	0,691	293,735	45	0,000

Sumber: Data Primer (diolah)

2. Penentuan jumlah faktor

Penentuan jumlah faktor yang terbentuk dalam analisis, didasarkan pada koefisien *eigenvalue*. Menurut Jogiyanto (2007:131), nilai minimum *eigenvalue* untuk membentuk suatu faktor adalah satu. Sebaliknya jika suatu variabel hanya memiliki *eigenvalue* lebih kecil dari satu, tidak dimasukkan ke dalam model.

Berdasarkan hasil analisis faktor tiap-tiap variabel terdapat beberapa *item* variabel yang memiliki nilai *eigenvalue* lebih dari atau sama dengan satu. Keseluruhan variabel terbentuk dijabarkan pada tabel 3 yang menjelaskan bahwa semua faktor yang terbentuk memiliki *eigenvalue* lebih besar dari 1 dan persentase kumulatif varian untuk setiap variabel varian lebih besar dari 50 persen.

Tabel 3
Total Varians yang Dijelaskan

Komponen	Koefisien <i>Eigenvalues</i>		
	Total	Varian (persen)	Kumulatif (persen)
Variabel regulasi dan mekanisme penganggaran daerah			
1	4,469	46,492	46,492
2	1,050	10,497	56,989
Variabel regulasi informasi dan komunikasi			
1	2,739	24,903	24,903
2	1,845	16,768	41,672
3	1.146	10,416	52,087

Komponen	Koefisien <i>Eigenvalues</i>		
	Total	Varian (persen)	Kumulatif (persen)
4	1.090	9,910	61,998
Variabel politik			
1	3,722	37,216	37,216
2	1,365	13,649	50,865
3	1,030	10,296	61,161
Variabel Perilaku oportunistik dan <i>moral hazard</i>			
1	3,682	30,679	30,679
2	1,732	14,432	45,112
3	1,279	10,662	55,774
Variabel ekspektasi risiko			
1	3,240	29,457	29,457
2	1,495	13,595	43,052
3	1,270	11,541	54,593
4	1,004	9,125	63,718

Sumber: Data Primer (Diolah)

3. Rotasi faktor

Hasil *Rotated component matrices*, menunjukkan bahwa *component matrix* memiliki distribusi variabel yang jelas dan nyata. Terlihat faktor *loading* yang

sebelumnya kecil makin diperkecil dan faktor *loading* yang besar semakin diperbesar. Adapun matriks komponen berdasarkan *factor loading* setelah teknik rotasi disajikan sebagai berikut.

Tabel 4
Variabel Regulasi dan Mekanisme Dalam Penganggaran Daerah

Item variabel	Component	
	1	2
Reg6	0,815	
Reg5	0,796	
Reg9	0,700	
Reg4	0,630	
Reg8	0,584	
Reg7	0,559	
Reg3		
Reg10		0,777
Reg2		0,762
		0,732
Reg1		0,523

Sumber: Data Primer (diolah)

Tabel 5
Variabel Informasi dan Komunikasi

Item variabel	Component			
	1	2	3	4
Inf2	,827			
Inf1	,769			
Inf5	,535			
Inf8				
In11				
Inf7				
Inf9				
Inf10			,849	
Inf3			,818	
Inf6				
Inf4				
				,765
				,599
				,504

Sumber: Data Primer (Diolah)

Tabel 6
Variabel Politik dalam Penganggaran

Item variabel	Component	
	1	2
Pol8	,825	
Pol9	,738	
Pol6	,689	
Pol10	,670	

Item variabel	Component	
	1	2
Pol1	,581	
Pol2	,530	
Pol3		,817
Pol7		,601
Pol4		,598

Sumber: Data Primer (Diolah)

Tabel 7
Variabel Perilaku Opportunistik dan Moral Hazard dalam Penganggaran

Item variabel	Component		
	1	2	3
Opp6	,796		
Opp5	,706		
Opp4	,668		
Opp11	,635		
Opp3	,610		
Opp2		,797	
Opp1		,720	
Opp7		,554	
Opp12		,400	
Opp9			,797
Opp8			,706
Opp10			,603

Sumber: Data Primer (Diolah)

Tabel 8
Variabel Risiko

Item variabel	Component			
	1	2	3	4
Risk4	,770			
Risk5	,762			
Risk6	,661			
Risk2	,612			
Risk7		,799		
Risk8		,793		
Risk3		,550		
Risk9			,774	
Risk10			,680	
Risk1			,488	

Item variabel	Component			
	1	2	3	4
Risk11				,817

Sumber: Data Primer (Diolah)

Berdasarkan hasil *Rotated Component Matrix*, dihasilkan 15 faktor yang direduksi dari 54 item variabel dan memiliki nilai loading $\geq 0,4$.

4. Penamaan faktor yang terbentuk

Menurut Hair et. al. (1998:113) pemberian nama pada faktor yang terbentuk dapat ditentukan dengan memberikan nama faktor yang dapat mewakili nama-nama variabel yang membentuk faktor tersebut. Cara lainnya dengan melihat nilai *loading factor* yang terbesar dari variabel-variabel yang membentuk faktor tersebut. Nilai *loading factor* tertinggi memiliki makna bahwa variabel tersebut mempunyai peranan paling besar dibandingkan dengan variabel lainnya yang membentuk faktor tersebut. Berdasarkan hasil analisis faktor konfirmatori (*confirmatory factor analysis*) terhadap variabel awal, terdapat beberapa faktor baru sebagai risiko fiskal dalam penganggaran daerah, yaitu:

- a. Variabel regulasi dan mekanisme dalam penganggaran daerah, ada 2 sumber risiko yaitu: faktor sinkronisasi dokumen APBD dengan KUA

dan PPAS dan faktor penerapan manajemen risiko di pemerintah daerah.

- b. Variabel informasi dan komunikasi, ada 4 sumber risiko yaitu faktor aksesibiliti dan transparansi, faktor mekanisme perencanaan dan penyusunan anggaran, faktor penentuan target dan indikator kerja belum tepat, dan faktor kendala keterbatasan sumberdaya manusia baik sebagai perencana, penyusun dan pelaksana anggaran.
- c. Variabel Politik dalam penganggaran daerah, ada 2 sumber risiko yaitu: faktor keunggulan kekuasaan (*discretionary power*) dan perilaku oportunistik oknum legislatif, faktor hubungan eksekutif dan legislatif (terkait mekanisme perumusan dan pembahasan APBD).
- d. Variabel oportunistik dan *moral hazard* dalam penganggaran, ada 3 sumber risiko yaitu: faktor perilaku oportunistik oknum penyusun anggaran, faktor *moral hazard* perencana dan pengusul anggaran, faktor manajemen organisasi publik terkait

kejelasan tanggung jawab, kewenangan dan fungsi.

- e. Variabel ekspektasi risiko, ada 4 sumber risiko yaitu: ekspektasi dan antisipasi risiko oleh pengusul dan penyusun anggaran, faktor pola penganggaran belanja modal, barang/jasa dan standar harga, faktor keterlambatan pengesahan APBD dan kondisi makroekonomi, serta faktor adanya pengeluaran yang tidak ada mata anggaran.

Kesimpulan

Risiko fiskal dapat juga dikatakan sebagai kemungkinan terjadinya perubahan kondisi yang menyebabkan realisasi anggaran pada masa yang akan datang tidak sesuai dengan jumlah yang dianggarkan. Untuk itu diperlukan berbagai upaya untuk mengungkap, mengantisipasi dan memitigasi faktor-faktor risiko utama yang mempengaruhi penganggaran. Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis faktor konfirmatori, maka terdapat 15 faktor risiko fiskal dalam penganggaran daerah yaitu: (1) sinkronisasi Dokumen APBD dan KUA dan PPAS, (2) ada atau tidaknya penerapan manajemen risiko di lingkungan pemerintah daerah, (3) aksesibiliti dan transparansi, (4) cara penentuan target dan indikator kerja, (5) keterbatasan SDM, (6) keunggulan kekuasaan (*discretionary power*) legislatif dan perilaku oportunistik

oknum legislatif, (7) hubungan eksekutif dan legislatif, (8) faktor perilaku oportunistik oknum penyusun anggaran, (9) faktor *moral hazard* perencana dan pengusul anggaran (10) manajemen organisasi, (11) ekspektasi dan antisipasi risiko oleh pengusul dan penyusun anggaran, (12) pola penganggaran belanja modal dan barang/jasa, (13) keterlambatan pengesahan APBD dan (14) kondisi makro ekonomi serta (15) pengeluaran yang tidak ada mata anggarannya.

Saran, Kebijakan dan Keterbatasan Penelitian

Pemerintah daerah perlu melakukan analisis terhadap berbagai kemungkinan adanya faktor-faktor risiko fiskal utama (peramalan risiko/*forecasting risk*) dalam anggaran (*risk budgeting*) yaitu yang mempengaruhi proyeksi besaran penerimaan, belanja dan pembiayaan anggaran serta berbagai kewajiban kontijensi yang mungkin dihadapi pemerintah dan semua hal tersebut juga dimuat dalam laporan tahunan anggaran. Selain itu risiko yang bersumber dari faktor non ekonomi juga harus diantisipasi dan ditindaklanjuti seperti faktor perilaku *opportunistik*, *moral hazard* dan kinerja organisasi, keterbatasan SDM dan pola penganggaran. Hal ini dilakukan agar pemda dapat mengantisipasi berbagai kondisi di masa depan yang dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya target anggaran yang telah ditetapkan.

Pemerintah daerah juga perlu mengalokasikan sejumlah dana untuk meng-cover terjadinya beban anggaran pada siklus anggaran. Keharusan mengalokasikan dana kontijensi dalam APBD akan memberi sinyal bahwa *contingent liabilities* berpotensi menimbulkan kerugian sehingga memberikan insentif bagi pembuat kebijakan untuk menerapkan mekanisme mitigasi risiko yang lebih baik.

Analisis hanya ditentukan eksplorasi faktor-faktor risiko fiskal dalam penganggaran daerah dan belum mampu menjelaskan secara detail dan rinci pengaruh faktor-faktor risiko tersebut dalam penganggaran di daerah. Masih banyak variabel lain yang belum tereksplorasi sehingga masih diperlukan penelitian yang lebih komprehensif dengan metode dan alat analisis lainnya yang lebih representatif. Perlu dilakukan penghitungan risiko secara kuantitatif sehingga bisa memberikan gambaran tentang perbedaan anggaran yang berbasis risiko (*budget based risk*) dengan anggaran non basis risiko.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Syukriy, dan Jhon Andra Asmara, 2006, *Perilaku Oportunistik Legislatif Dalam Penganggaran Daerah: Bukti Empiris Atas Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik*. Diakses dari <http://swamandiri.org/2008/02/10/perilaku-oportunistik-legislatif-dalam-penganggaran-daerah-bukti-empiris-atas-aplikasi-agency-theory-di-sektor-publik/> pada tanggal 14 Juni 2009.
- Ampri, Irfa, 2006, *Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah: Pengantar Aplikasi pada Unit-unit Departemen Keuangan Jurnal Akuntansi Pemerintah*. Vol. 2, No. 1 Hal 79-91, Mei 2006. Sumber: www.bppk.go.id, diunduh 5 september 2009.
- Anonim, 2008, *Kerangka Analisis Pengungkapan Risiko Fiskal Dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2008*. Diakses dari <http://risikofiskal.blogspot.com/2008/08/kerangka-analisis-pengungkapanrisiko.html>, pada tanggal 12 Mei 2009.
- Blondal, 2008, *Fiscal Risk Management, IMF High-Level Seminar on Fiscal Risk Management*, Paris, 28 October 2008. Diakses dari <http://blog-pfm.imf.org/ParisConference/Blondal.pdf> pada tanggal 27 Mei 2009.
- Bixi, Hana Polackova dan Allen Schick, 2002, *Government at Risk: Contingent Liabilities and Fiscal Risk*, dalam Bixi and Schick (ed), 2002. *Government at Risk: Contingent Liabilities and Fiscal Risk*, a Copublication of The World Bank and Offord University Press. Hal: 1-58
- Bixi, Hana Polackova dan Ashoko Moody, 2002, *Dealing With Government Fiscal Risk: an Overview* dalam Bixi dan Schick (ed), 2002. *Government at Risk: Contingent Liabilities and Fiscal Risk*, a Copublication of The World Bank and Offord University Press. Hal: 21-58.
- Ghozali, Imam, 2007, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hair, Joseph F., Rolph E. Anderson, Ronal L. Tatham and William C. Black, 1998, *Multivariate Data Analysis*, Fifth Edition, Prentice Hall Upper Saddle River New Jersey 07548.
- Halim, Abdulah, 2008, *Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi*. Diakses dari

- <http://www.bppk.depkeu.go.id/index.php/2008050879/jurnal-akuntansi-pemerintah/hubungan-dan-masalah-keagenan-di-pemerintahan-daerah.html> pada tanggal 27 Mei 2009.
- Hanafi, Mamduh M, 2006, *Manajemen Risiko*, UP STIM YKPN, Jogjakarta.
- Hemming, Richard dan Murray Petrie, 2002, *A Framework for Assesing Fiscal Vulnerability*, dalam *Government at Risk*, dalam Brixi dan Schick (ed), 2002. *Government at Risk: Contingent Liabilities and Fiscal Risk*, a Copublication of The World Bank and Offord University Press. Hal: 159-178.
- International Monetary Funds (IMF), 2007, *Increasing Fiscal Transparency- Brazil's Budgetary Fiscal Risk Report*. Diakses dari <http://blog-pfm.imf.org/pfmblog/2007/11/increasing-fisc.html> pada tanggal 9 Juli 2009.
- Jorion, Phillippe, 2001, *Value a Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk*. McGraw Hill, USA.
- Kuncoro, Mudrajad, 2003, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Ma, Jun, 2002, *Monitoring Fiscal Risk of Subnational Government: Selected Country Experiences* dalam Brixi dan Schick (ed), 2002. *Government at Risk: Contingent Liabilities and Fiscal Risk*, a Copublication of The World Bank and Offord University Press. Hal: 393-424.
- Petrie, Murray, 2002, *Accounting and Financial Accountability to Capture Risk*, dalam Brixi dan Schick (ed), 2002. *Government at Risk: Contingent Liabilities and Fiscal Risk*, a copublication of the world bank and offord university press. Hal: 59-78.
- Republik Indonesia, 2009, *Nota Keuangan RAPBN 2009*. Diakses dari www.depkeu.go.id
- Schick, Allen, 2002, *Budgeting for fiscal Risk* dalam Brixi dan Schick (ed), 2002. *Government at Risk: Contingent Liabilities and Fiscal Risk*, a Copublication of The World Bank and Offord University Press. Hal: 79-97.
- ,(2008), *Budgeting for Fiscal Risk*, Slide Presented to the *Fiscal Affairs Division International Monetary Funds*, 17 September 2008. Diakses dari http://blog-pfm.imf.org/pfmblog/files/budgeting_for_fiscalrisk_by

shick.ppt pada tanggal 1 Juni
2009.

Soeratno dan Arsyad, Lincolin, 2003,
Metodologi Penelitian untuk

Ekonomi dan Bisnis, Edisi
Revisi, Unit Penerbit dan
Percetakan YKPN, Yogyakarta
Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian
Bisnis*, Alfabeta, Bandung.